

Katalog BPS: 1105005.21

POTENSI DESA

★ KEPULAUAN RIAU ★

2014



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

<http://kepri.bps.go.id>





POTENSI DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2014

<http://kepri.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

ISBN. : 978-602-0979-22-9

No. Publikasi : 21000.1513

Katalog BPS : 1105005.21

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : ix + 58 halaman

Naskah :

Seksi Ketahanan Sosial

Gambar Kulit :

Bidang IPDS

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Organisasi Penulisan

Pengarah :

Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si

Editor :

Faharuddin, M.Si

Penulis :

Nurwulandari, SST

Pengolah Data :

Dian Kartika Sari, SST, M.Si

Nurwulandari, SST

Setting :

Nurwulandari, SST

<http://kepri.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar desa di Provinsi Kepulauan Riau yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada.

Publikasi Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi yang sudah terbit secara rutin setiap tiga tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis.

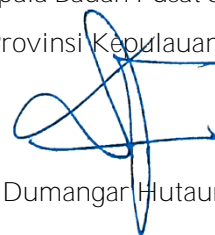
Materi yang disajikan dalam Publikasi Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor yang dikelompokkan dalam bagian-bagian sebagai berikut: penjelasan umum, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan, angkutan komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan serta keterangan aparat desa. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Tanjungpinang, November 2014

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Kepulauan Riau



Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Organisasi Penulisan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Keterangan Umum Desa/Kelurahan	7
Bab 3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	13
Bab 4. Perumahan dan Lingkungan Hidup	17
Bab 5. Pendidikan dan Kesehatan	23
Bab 6. Sosial dan Budaya	31
Bab 7. Hiburan	35
Bab 8. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi	39
Bab 9. Ekonomi	45
Bab 10. Keamanan	51
Bab 11. Keterangan Aparatur Desa	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Klasifikasi Pemerintahan, 2014 9
Tabel 2.2	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014 10
Tabel 2.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah, 2014 11
Tabel 3.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014 15
Tabel 3.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Agen Pencari TKI/TKW, 2014 16
Tabel 4.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2014 19
Tabel 4.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah, 2014 20
Tabel 4.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah SUTET, dan Permukiman Kumuh, 2014 21
Tabel 5.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, 2014 25
Tabel 5.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lembaga Pendidikan Keterampilan, 2014 26
Tabel 5.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 2014 27
Tabel 5.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Kesehatan, 2014 28
Tabel 6.1.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama, 2014 33
Tabel 6.1.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Suku/Etnis, Kepulauan Riau 2014 34
Tabel 7.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Gedung Bioskop, dan Pub/Diskotek/Karaoke, 2014 37
Tabel 7.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Program Televisi, 2014. 38
Tabel 8.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi, 2014 ... 41
Tabel 8.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, 2014 42

Tabel 9.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Perdagangan, 2014	47
Tabel 9.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Akomodasi, 2014	48
Tabel 9.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Pemasaran Produksi, 2014	49
Tabel 9.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian, 2014	49
Tabel 9.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Industri Kecil dan Mikro, 2014	50
Tabel 10.1.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir	53

<http://kepri.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Klasifikasi Pemerintahan, 2014 9
Grafik 2.2	Persentase Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014 10
Grafik 2.3	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah, Kepulauan Riau 2014 11
Grafik 3.1	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Kepulauan Riau 2014 15
Grafik 4.1	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2014 19
Grafik 4.2	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah, Kepulauan Riau 2014 20
Grafik 4.3	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Buang Air Besar, Kepulauan Riau 2014 20
Grafik 4.4	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah SUTET, dan Permukiman Kumuh, Kepulauan Riau 2014 21
Grafik 5.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Kepulauan Riau 2014 25
Grafik 5.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lembaga Pendidikan Keterampilan, Kepulauan Riau 2014 26
Grafik 5.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kepulauan Riau 2014 26
Grafik 5.4	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Kesehatan, Kepulauan Riau 2014 27
Grafik 5.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Tenaga Kesehatan, Kepulauan Riau 2014 29
Grafik 5.6.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir, Kepulauan Riau 29
Grafik 5.6.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jumlah Penderita Gizi Buruk, 2014 29
Grafik 6.1.1	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama, Kepulauan Riau 2014 33
Grafik 6.1.2	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Suku/Etnis, Kepulauan

	Riau 2014	33
Grafik 6.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat, Kepulauan Riau 2014	34
Grafik 7.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Gedung Bioskop, dan Pub/Diskotek/Karaoke, Kepulauan Riau 2014	37
Grafik 7.2	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Program Televisi, Kepulauan Riau 2014	37
Grafik 8.1	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi, Kepulauan Riau 2014	41
Grafik 8.2	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas, Kepulauan Riau 2014	42
Grafik 8.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, Kepulauan Riau 2014	42
Grafik 9.1	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Perdagangan, Kepulauan Riau 2014	47
Grafik 9.2	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Akomodasi, Kepulauan Riau 2014	48
Grafik 9.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Pemasaran Produksi, Kepulauan Riau 2014	48
Grafik 9.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Industri Kecil dan Mikro, Kepulauan Riau 2014	49
Grafik 10.1.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir, Kepulauan Riau	53
Grafik 10.1.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban Selama Setahun Terakhir, Kepulauan Riau	53
Grafik 10.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Pidana, Kepulauan Riau	54
Grafik 11.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah, Kepulauan Riau 2014	57
Grafik 11.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Desa/Lurah, Kepulauan Riau 2014	57



<http://kepri.bps.go.id>

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Namun demikian, sejak tahun 2008 Podes dilaksanakan secara rutin setiap 3 tahun dan terpisah dari rangkaian kegiatan sensus tertentu. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Adapun pendataan Podes dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- i. menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi : sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah
- ii. menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah (seperti: perkotaan-perdesan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya) dan penyusunan statistik wilayah kecil
- iii. melengkapi penyusunan kerangka sampling untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut.

PODES 2014

Dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi terkecil setingkat desa di seluruh Indonesia

KEGUNAAN DATA PODES 2014

Salah satu kegunaan dari hasil pendataan Podes 2014 adalah sebagai data dasar untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2016

CAKUPAN WILAYAH

Berdasarkan kondisi wilayah pada bulan Desember 2013, Podes 2014 Provinsi Kepulauan Riau mencakup 415 wilayah setingkat desa/kelurahan yang tersebar di 66 kecamatan, 7 kabupaten/kota

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi terkecil setingkat desa di seluruh Indonesia. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut :

1. memiliki wilayah hukum dengan batas wilayah yang jelas
2. memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya
3. memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Pengumpulan data Podes dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang berwenang dan relevan di wilayah pencacahan. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pada pelatihan Podes berstandar nasional. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, tanggung jawab dan relevan terhadap wilayah target pencacahan. Dokumen pencacahan dilarang diisi oleh narasumber untuk menghindari kesalahan antara data dengan konsep dan definisi operasionalnya.

Penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pencacahan lapangan yang dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus melalui:

TARGET LOKASI PENDATAAN PODES 2014

Jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional

NARASUMBER PODES 2014

Beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, relevan dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan

PENJAMINAN KUALITAS PODES 2014

Penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pencacahan lapangan yang dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus

1. Pemeriksaan kelengkapan dan validitas isian dokumen
2. Pemeriksaan ketatalaksanaan lapangan
3. Monitoring kualitas data

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan melalui penggunaan teknologi SMS Center yang disajikan dalam Website.

Secara khusus, publikasi ini berisi ringkasan eksekutif dari hasil pendataan Podes 2014 yang meliputi aspek-aspek berikut :

1. Pendahuluan
2. Keterangan Umum Desa/Kelurahan
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
4. Perumahan dan Lingkungan Hidup
5. Pendidikan dan Kesehatan
6. Sosial dan Budaya
7. Hiburan
8. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi
9. Ekonomi
10. Keamanan
11. Keterangan Aparatur Desa

HASIL MONITORING PODES 2014

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan melalui penggunaan teknologi SMS Center yang disajikan dalam Website

2

<http://kepri.bps.go.id>

2.1 Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah

Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut sebagai desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Sedangkan Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU No. 32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota.

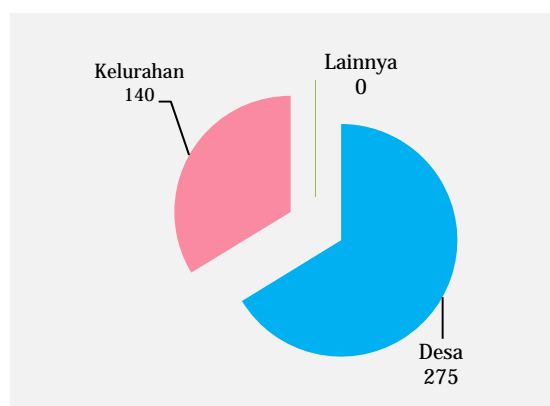
Berdasarkan hasil pengolahan Podes 2014 (Tabel 2.1), banyaknya wilayah administrasi pemerintahan terendah di Kepulauan Riau menurut klasifikasi pemerintahan tahun 2014 adalah 275 Desa dan 140 Kelurahan, sedangkan untuk wilayah administrasi pemerintahan terendah Lainnya, sejak tahun 2011 keberadaannya sudah tidak ada lagi di Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah administrasi pemerintahan terendah Lainnya berupa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang dibentuk atas Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Tabel 2.1
Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Klasifikasi Pemerintahan, 2014

Kab/Kota	Desa	Kelurahan	Lainnya	Jumlah
Karimun	42	29	0	71
Bintan	36	15	0	51
Natuna	70	6	0	76
Lingga	75	6	0	81
Kep. Anambas	52	2	0	54
Batam	0	64	0	64
Tanjungpinang	0	18	0	18
KEP. RIAU	275	140	0	415

Grafik 2.1
Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Klasifikasi Pemerintahan, 2014



Wilayah administrasi pemerintahan terendah Lainnya berupa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)

Transmigrasi Republik Indonesia.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya (PP No. 72 Tahun 2005).

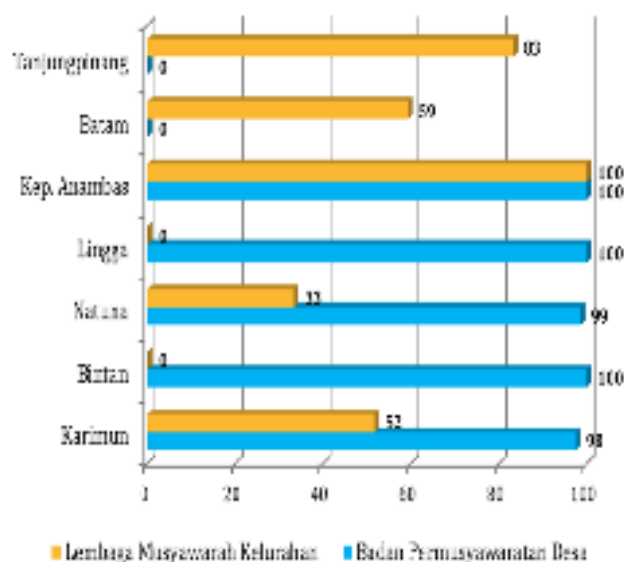
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).

Dari Grafik 2.2, pada tahun 2014 terlihat bahwa hampir seluruh desa/kelurahan yang ada di 7 kabupaten/kota di Kepulauan Riau sudah memiliki BPD/LMK, terutama di Kabupaten

Tabel 2.2
Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014

Kab/Kota	Desa		Kelurahan	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Karimun	41	1	15	14
Bintan	36	0	0	15
Natuna	69	1	2	4
Lingga	75	0	0	6
Kep. Anambas	52	0	2	0
Batam	0	0	38	26
Tanjungpinang	0	0	15	3
KEP. RIAU	273	2	72	68

Grafik 2.2
Persentase Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014



Kepulauan Anambas, yang jumlah BPD/LMK-nya sudah 100 persen, artinya seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memiliki BPD/LMK. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat desa/kelurahan untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa/kelurahan semakin meningkat. Ini selaras dengan kaidah check and balance yang ingin diwujudkan oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

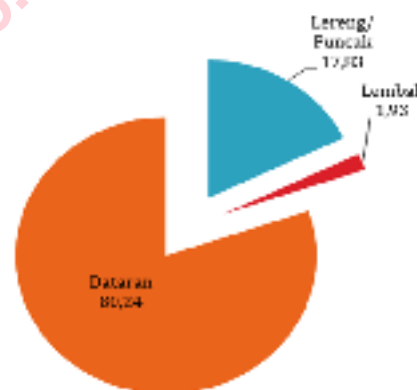
2.3 Topografi Wilayah

Topografi desa/kelurahan dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa/kelurahan, dibedakan menjadi:

1. Lereng adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung).
2. Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan.
3. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.

Sebagian besar desa/kelurahan yang ada di 7 kabupaten/kota di Kepulauan Riau, sudah memiliki BPD/LMK, terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang jumlah BPD/LMK-nya sudah 100 persen, artinya setiap desa/kelurahan memiliki BPD/LMK.

Grafik 2.3
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah, Kepulauan Riau 2014



Tabel 2.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah, 2014

Kab/Kota	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Karimun	0	0	71	71
Bintan	0	0	51	51
Natuna	28	2	46	76
Lingga	4	0	77	81
Kep. Anambas	37	6	11	54
Batam	3	0	61	64
Tanjungpinang	2	0	16	18
KEP. RIAU	74	8	333	415

Dari Grafik 2.3, pada tahun 2014 terlihat bahwa sebagian besar topografi wilayah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau adalah berupa Dataran (80,24 persen dari seluruh jumlah desa/kelurahan). Sedangkan wilayah sisanya adalah berupa Lereng/Puncak (17,83 persen) dan Lembah (1,93 persen).

Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang memiliki desa terbanyak dimana topografi wilayah desanya berupa Lereng/Puncak.

<http://kepri.bps.go.id>



<http://kepri.bps.go.id>

3.1 Sumber Penghasilan Utama Penduduk

Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah sektor atau bidang usaha dimana sebagian besar penduduk memperoleh penghasilan/pendapatan, meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar/eceran dan rumah makan, angkutan, pergudangan, dan komunikasi, jasa dan lainnya.

Berdasarkan Grafik 3.1, pada tahun 2014 mayoritas desa/kelurahan di Kepulauan Riau memiliki potensi utama di sektor Pertanian (75,42 persen). Sedangkan desa/kelurahan dengan potensi utama di sektor Industri Pengolahan hanya 8,67 persen dan sektor Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan sebesar 6,51 persen. Sedangkan sisanya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, sektor Jasa dan sektor Lainnya.

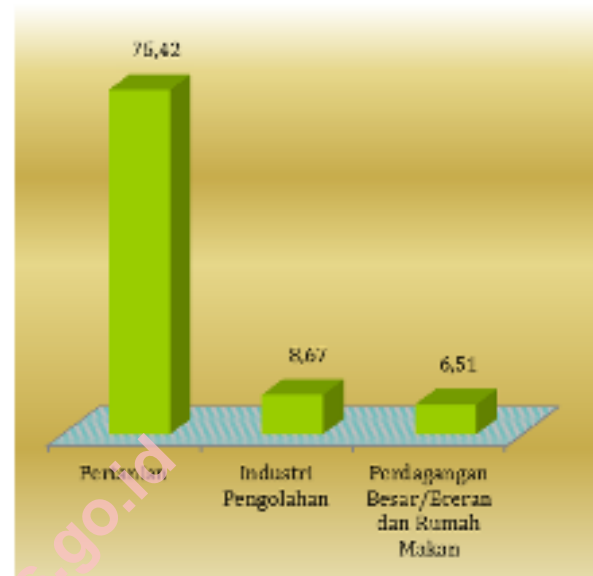
3.2 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Agen Pencari Tenaga Kerja Indonesia/Wanita

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan (upah).

Agen Pencari Tenaga Kerja Indonesia/Wanita adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung, dan menyalurkan TKI/TKW.

Melihat Tabel 3.2, pada tahun 2014 terdapat

Grafik 3.1
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, Kepulauan Riau 2014



Tabel 3.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014

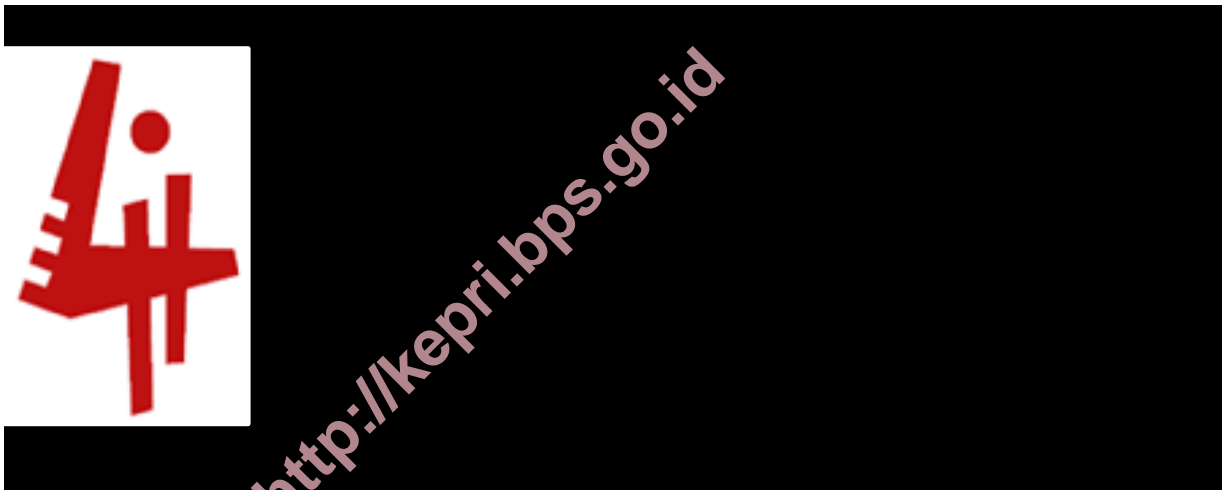
Kab/Kota	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Angkutan, Pergudangan, Jasa Lainnya	Komunikasi
Karimun	51	6	0	9	0	5
Bintan	39	0	7	1	0	1
Natuna	75	0	0	0	0	1
Lingga	75	1	0	1	0	4
Kep. Anambas	50	1	0	2	1	0
Batam	20	0	29	10	0	4
Tanjungpinang	3	0	0	4	0	8
KEP. RIAU	313	8	36	27	1	23

58 desa/kelurahan yang memiliki Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, desa/kelurahan tersebut tersebar di 6 kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Kabupaten/kota yang berpotensi paling besar mengirimkan TKI ke luar negeri adalah Kota Batam. Hal ini dikarenakan Kota Batam secara geografis terletak di perbatasan antar negara Indonesia-Malaysia-Singapura.

Sedangkan untuk Agen Pencari Tenaga Kerja Indonesia/Wanita di Kepulauan Riau, keberadaannya terdapat di 8 desa/kelurahan yang tersebar di 2 kota, namun untuk wilayah kabupaten tidak terdapat satu pun Agen Pencari TKI/TKW. Kota Batam merupakan kota yang paling banyak memiliki desa/kelurahan yang mengirimkan TKI ke luar negeri dan Batam juga paling banyak memiliki agen pencari Tenaga Kerja Indonesia/Wanita.

Tabel 3.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Agen Pencari TKI/TKW, 2014

Kab/Kota	Tenaga Kerja Indonesia		Agen Pencari TKI/TKW	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Karimun	15	39	0	71
Bintan	3	33	0	51
Natuna	6	68	0	76
Lingga	7	67	0	81
Kep. Anambas	4	46	0	54
Batam	23	21	6	58
Tanjungpinang	0	12	2	16
KEP. RIAU	58	286	8	407



4.1 Keluarga Pengguna Listrik

Keluarga Pengguna Listrik Negara (PLN) adalah keluarga yang menggunakan listrik dari PLN dan membayar tagihan listrik secara resmi dengan ditandai oleh bukti tagihan dari PLN.

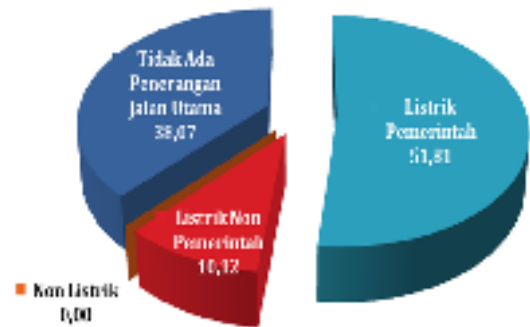
Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN adalah keluarga yang menggunakan listrik selain dari PLN. Termasuk keluarga yang menyambung/menyantol listrik dari tetangga (keluarga lain). Listrik Non-PLN misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, dan listrik swadaya masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4.1, pada tahun 2014 di Kepulauan Riau terdapat 294 desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya merupakan keluarga pengguna listrik PLN, dan sebanyak 293 desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya merupakan keluarga pengguna listrik non-PLN.

Sumber Penerangan Jalan Utama Desa adalah jenis dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa.

Melihat Grafik 4.1, untuk desa/kelurahan yang memiliki sumber penerangan jalan utama desa/kelurahan di Kepulauan Riau, terdapat 51,81 persen desa/kelurahan yang menggunakan Listrik Pemerintah sebagai sumber penerangan jalan utama desa. Sisanya sebanyak 10,12 persen desa/kelurahan yang menggunakan Listrik Non-Pemerintah, namun tidak ada satu pun desa/kelurahan yang tidak menggunakan listrik untuk penerangan jalan utama (0,00 persen).

Grafik 4.1
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2014



Tabel 4.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2014

Kab/Kota	Keluarga Pengguna Listrik		Sumber Penerangan Jalan Utama		
	PLN	Non-PLN	Listrik Pemerintah	Listrik Non Pemerintah	Non Listrik
Karimun	58	43	43	4	0
Bintan	45	40	37	5	0
Natuna	47	58	20	15	0
Lingga	47	57	31	13	0
Kep. Anambas	24	46	21	4	0
Batam	55	35	46	1	0
Tanjungpinang	18	14	17	0	0
KEP. RIAU	294	293	215	42	0

Pembangunan infrastruktur desa yang baik, khususnya di bidang ketenagalistrikan, dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki penerangan jalan utama desa cukup banyak yaitu 38,07 persen. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan infrastruktur desa dalam hal ketenagalistrikan sehingga perekonomian masyarakat pun bisa lebih hidup dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

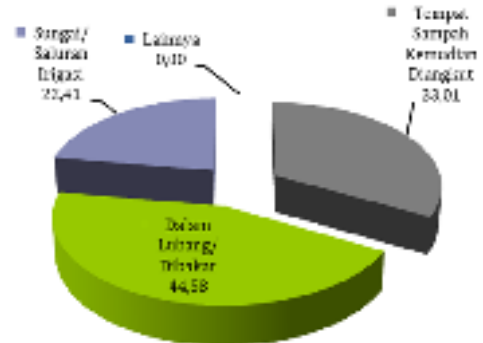
4.2 Tempat Pembuangan Sampah

Jenis Tempat Pembuangan Sampah mencakup dua hal yaitu tempat yang digunakan dan cara yang dilakukan untuk penanganan sampah. Pada Grafik 4.2 tentang cara penanganan sampah, terlihat bahwa pada tahun 2014, sebanyak 44,58 persen desa/kelurahan di Kepulauan Riau membuang sampah dengan cara Dikubur di dalam Lubang/Dibakar, sebanyak 33,01 persen desa/kelurahan membuang sampah di Tempat Sampah yang Kemudian Diangkut, sebanyak 22,41 persen desa/kelurahan membuang sampah ke Sungai/Saluran Irigasi, sedangkan sisanya adalah membuang sampah ke saluran Drainase dan Lainnya.

4.3 Tempat Buang Air Besar

Pada Grafik 4.3, terlihat bahwa sebagian besar desa/kelurahan yang ada di Kepulauan Riau pada tahun 2014 sudah memiliki Jamban Sendiri (93,73 persen), 1,69 persen desa/kelurahan memiliki Jamban Bersama, 1,69 persen desa/kelurahan memiliki Jamban Umum, dan 2,89 persen desa/kelurahan Tidak Memiliki Jamban

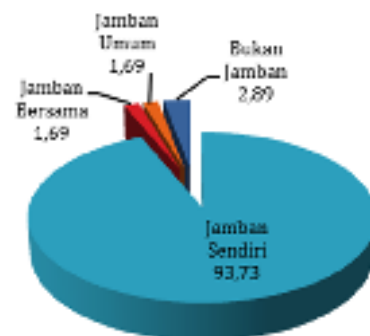
Grafik 4.2
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah, Kepulauan Riau 2014



Tabel 4.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah, 2014

Kab/Kota	Jenis Tempat Pembuangan Sampah			
	Tempat Sampah Kemudian Diangkut	Dalam Lubang/Dibakar	Sungai/Saluran Irigasi	Lainnya
Karimun	20	43	8	0
Bintan	21	21	9	0
Natuna	7	47	22	0
Lingga	4	42	35	0
Kep. Anambas	24	25	5	0
Batam	45	6	13	0
Tanjungpinang	16	1	1	0
KEP. RIAU	137	185	93	0

Grafik 4.3
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Buang Air Besar, Kepulauan Riau 2014



sebagai tempat pembuangan air besar. Hal ini tentunya juga dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

4.4 Keberadaan Permukiman

Permukiman di Bantaran Sungai adalah wilayah permukiman yang berada di lahan pada kedua sisi sepanjang sungai yang dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Jarak dihitung dari tepi sungai kurang lebih 20 meter.

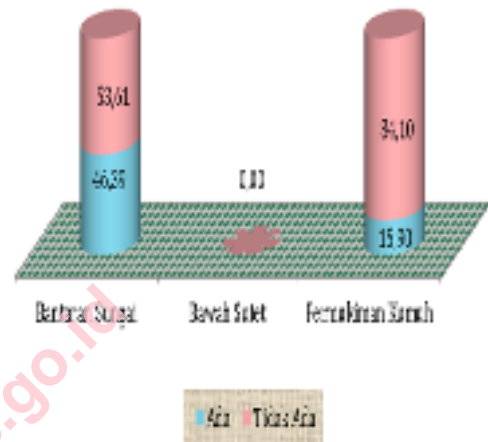
Permukiman Di Bawah SUTET adalah wilayah permukiman yang berada di bawah lintasan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) dan berjarak kurang lebih 20 meter.

Permukiman Kumuh adalah wilayah permukiman dengan bangunan yang padat dan tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang buruk dan sangat padat penduduk. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marginal misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya.

Pada Grafik 4.4, tergambar pada tahun 2014 di Kepulauan Riau terdapat 46,39 persen desa/kelurahan yang memiliki Permukiman di Bantaran Sungai, 15,90 persen desa/kelurahan yang memiliki Permukiman Kumuh, dan tidak ditemukan Permukiman di Bawah SUTET (0,00 persen) pada desa/kelurahan se-Kepulauan Riau.

Sedangkan berdasarkan Tabel 4.4, desa/kelurahan terbanyak yang memiliki permukiman di Bantaran Sungai terdapat di

Grafik 4.4
 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah SUTET, dan Permukiman Kumuh, Kepulauan Riau 2014



Tabel 4.4
 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, di Bawah Sutet, dan Permukiman Kumuh, 2014

Kab/Kota	Permukiman				Permukiman Kumuh	
	Bantaran Sungai		Bawah Sutet		Ada	Tidak Ada
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		
Karimun	7	6	0	0	15	56
Bintan	7	16	0	0	10	41
Natuna	20	23	0	0	1	75
Lingga	35	24	0	0	4	77
Kep. Anambas	6	14	0	0	0	54
Batam	0	5	0	0	32	32
Tanjungpinang	2	1	0	0	4	14
KEP. RIAU	77	89	0	0	66	349

Kabupaten Lingga (35 desa/kelurahan) dan Kabupaten Natuna (20 desa/kelurahan), kemudian desa/kelurahan terbanyak yang memiliki Permukiman Kumuh terdapat di Kota Batam (32 desa/kelurahan) dan Kabupaten Karimun (15 desa/kelurahan), namun tidak ada satu pun desa/kelurahan di Kepulauan Riau yang memiliki permukiman di bawah SUTET.



<http://kepri.bps.go.id>



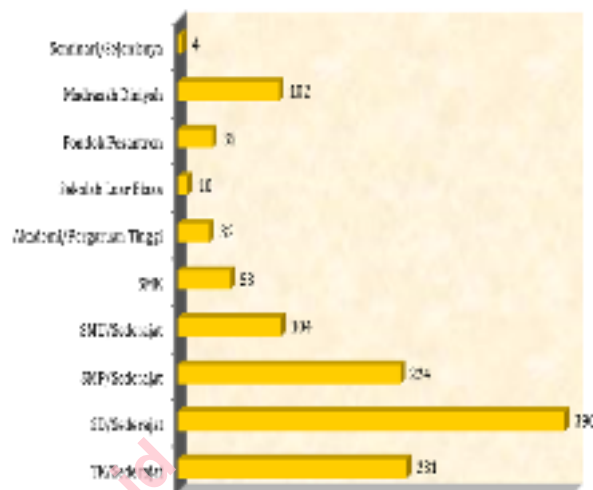
<http://kepri.bps.go.id>

5.1 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.

TK/Sederajat, meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanuf Athfal (BA) dan Raudatul Athfal (RA). SD/Sederajat, meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta. SMP/Sederajat, meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta. SMU/Sederajat, meliputi Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta. SMK, meliputi Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), baik negeri maupun swasta. Akademi/Perguruan Tinggi, meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas, baik negeri maupun swasta. Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sarana pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional dan mental. Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP No. 55 tahun 2007). Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Seminari atau sejenisnya adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam

Grafik 5.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Kepulauan Riau 2014



Tabel 5.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, 2014

Kab./Kota	TK/ Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMU/ Sederajat	SMK	Akademi/ Perguruan Tinggi	Sekolah Luar Biasa	Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah	Seminari/ Sejenisnya
Karimun	39	66	43	17	7	2	3	5	8	0
Bintan	27	48	26	10	7	1	1	2	8	0
Natuna	53	64	31	17	5	3	0	6	54	2
Lingga	12	79	33	11	5	4	0	3	10	0
Kep. Anambas	28	51	20	6	1	1	0	2	10	1
Batam	55	64	57	36	21	14	4	14	3	1
Tanjungpinang	17	18	14	7	7	7	2	3	9	0
KEP. RIAU	231	390	224	104	53	32	10	35	102	4

profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam komplek pendidikan.

Pada Grafik 5.1 terlihat pada tahun 2014 di Kepulauan Riau terdapat 390 desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan SD/Sederajat, 224 desa/kelurahan yang memiliki SMP/Sederajat, 104 desa/kelurahan yang memiliki SMU/Sederajat, dan 32 desa/kelurahan yang memiliki Akademi/Perguruan Tinggi.

5.2 Pendidikan Keterampilan

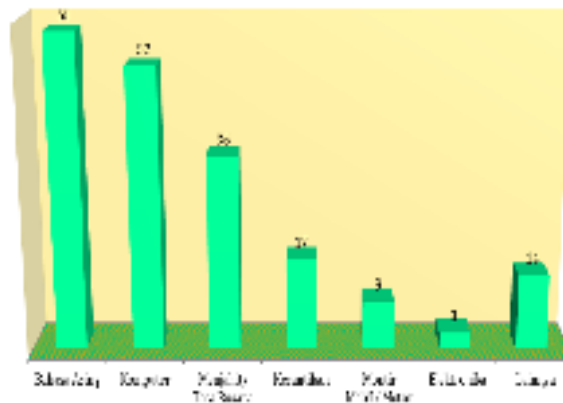
Pendidikan Keterampilan adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh lembaga pelatihan atau kursus keterampilan yang mempunyai ciri: jangka waktu pendidikan relatif pendek dan menyediakan sertifikat bagi peserta pelatihan yang lulus ujian.

Pada Grafik 5.2 dan Tabel 5.2 terlihat pada tahun 2014 di Kepulauan Riau terdapat 52 desa/kelurahan yang memiliki Lembaga Pendidikan Keterampilan Komputer, jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kota Batam.

5.3 Keaksaraan Fungsional, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Keaksaraan Fungsional adalah metode pemberantasan buta aksara meliputi pengajaran kemampuan baca, tulis, dan hitung, serta berbagai keterampilan lain misalnya memasak, menjahit, pembuatan kain sulam, dan sebagainya.

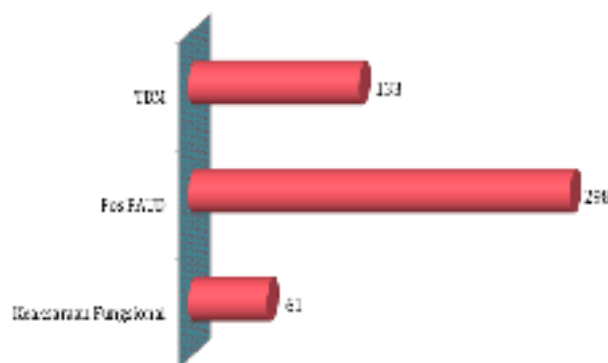
Grafik 5.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lembaga Pendidikan Keterampilan, Kepulauan Riau 2014



Tabel 5.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lembaga Pendidikan Keterampilan, 2014

Kab/Kota	Bahasa Asing	Komputer	Menjahit/Tata Busana	Kecantikan	Montir Mobil/Motor	Elektronika Lainnya
Karimun	6	6	3	0	0	0
Bintan	9	8	13	3	4	3
Natuna	4	8	1	0	1	0
Lingga	0	3	0	0	0	0
Kep. Anambas	0	2	7	2	0	0
Batam	30	22	10	11	1	0
Tanjungpinang	9	3	2	1	3	0
KEP. RIAU	58	52	36	17	9	3

Grafik 5.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Pos PAUD, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kepulauan Riau 2014



Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk pertumbuhan atau perkembangan jasmani dan rohani agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat, merupakan potensi pemberdayaan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pada Grafik 5.3 tergambar bahwa pada tahun 2014 di Kepulauan Riau terdapat 61 desa/kelurahan yang memiliki Kegiatan Keaksaraan Fungsional, 298 desa/kelurahan yang memiliki Pos PAUD, dan 133 desa/kelurahan yang memiliki TBM.

5.4 Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang dicatat dalam Podes 2014 adalah sarana kesehatan yang masih aktif/beroperasi.

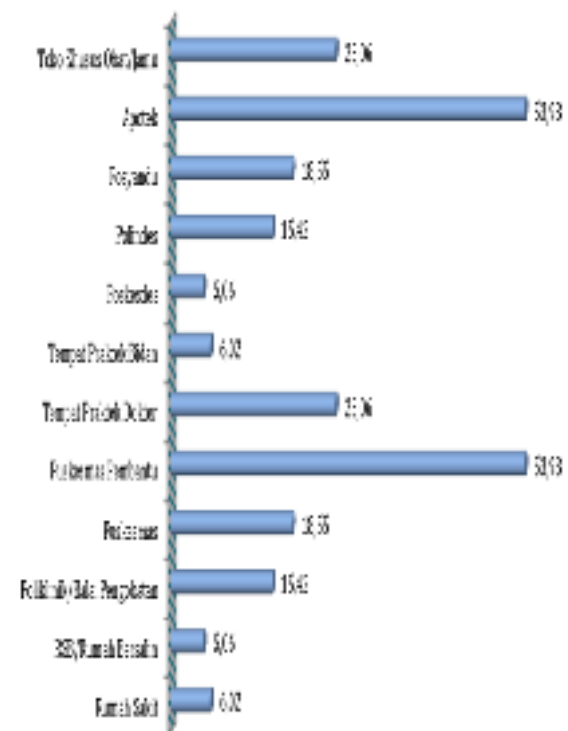
Rumah Sakit (RS) adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan,

Tabel 5.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Pos PAUD, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 2014

Kab/Kota	Keaksaraan Fungsional	Pos PAUD	TBM
Karimun	9	47	15
Bintan	16	45	35
Natuna	9	54	11
Lingga	3	61	26
Kep. Anambas	13	21	7
Batam	7	54	26
Tanjungpinang	4	16	13
KEP. RIAU	61	298	133

Grafik 5.4
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Kesehatan, Kepulauan Riau 2014



rawat inap dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.

Puskesmas adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.

Pada Grafik 5.4 terlihat pada tahun 2014 di Kepulauan Riau, persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan Posyandu adalah sebanyak 18,55 persen, 6,02 persen desa/kelurahan yang memiliki Tempat Praktek Bidan, 53,98 persen desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas Pembantu, dan 5,06 persen desa/kelurahan yang memiliki Poskesdes.

Kemudian pada Tabel 5.4, kabupaten/kota yang memiliki desa/kelurahan dengan sarana kesehatan Rumah Sakit dan RSB/Rumah Bersalin terbanyak terdapat di Kota Batam, yaitu masing-masing sebanyak 12 dan 15 desa/kelurahan. Kota Batam juga merupakan kota yang memiliki desa/kelurahan terbanyak dalam hal kepemilikan Tempat Praktek Bidan, yaitu sebanyak 12 desa/kelurahan.

5.5 Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan

Tabel 5.4
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Kesehatan, 2014

Kab/Kota	Rumah Sakit	RSB/ Rumah Bersalin	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Praktek Dokter
Karimun	2	4	7	9	38	20
Bintan	2	2	7	14	27	12
Natuna	2	0	1	13	32	6
Lingga	2	0	1	8	35	8
Kep. Anambas	2	0	4	8	34	4
Batam	12	15	37	19	45	38
Tanjungpinang	3	0	7	6	13	16
KEP. RIAU	25	21	64	77	224	104

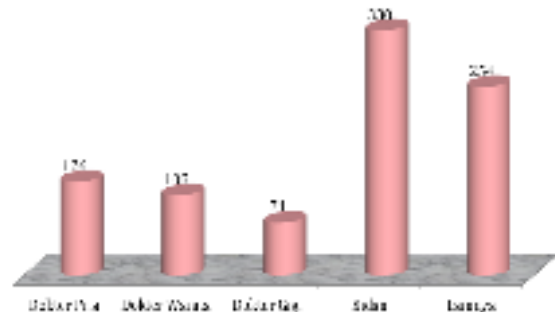
Kab/Kota	Tempat Praktek Bidan	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Apotek	Toko Khusus Obat/Jamu
Karimun	2	4	7	9	38	20
Bintan	2	2	7	14	27	12
Natuna	2	0	1	13	32	6
Lingga	2	0	1	8	35	8
Kep. Anambas	2	0	4	8	34	4
Batam	12	15	37	19	45	38
Tanjungpinang	3	0	7	6	13	16
KEP. RIAU	25	21	64	77	224	104



husus bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada Grafik 5.5 terlihat pada tahun 2014 di Kepulauan Riau terdapat 126 orang Dokter Pria, 108 orang Dokter Wanita, 71 orang Dokter Gigi, 330 orang Bidan, dan 254 orang tenaga kesehatan Lainnya. Tenaga kesehatan Lainnya meliputi: mantri kesehatan, apoteker, perawat, tenaga keterampilan fisik, dan sebagainya. Jumlah tenaga kesehatan tersebut tentunya masih jauh dari kata cukup mengingat wilayah Kepulauan Riau yang cukup besar dengan jumlah desa yang banyak.

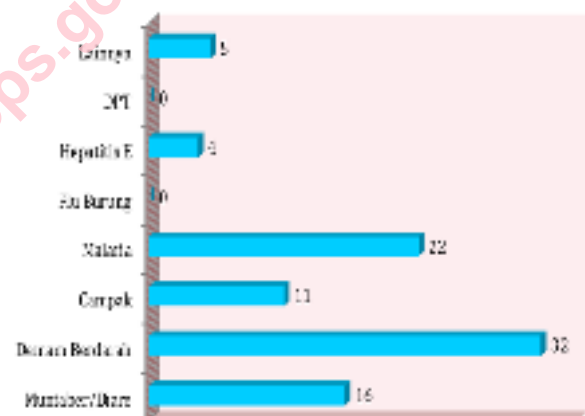
Grafik 5.5
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Tenaga Kesehatan, Kepulauan Riau 2014



5.6 Wabah Penyakit dan Penderita Gizi Buruk

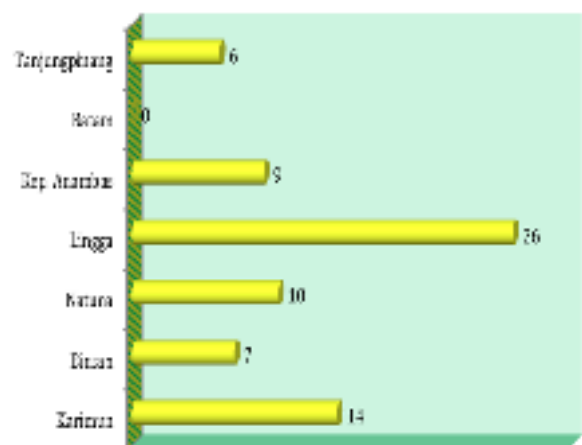
Wabah Penyakit adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat di daerah tertentu yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata pada waktu yang relatif singkat dan menimbulkan malapetaka.

Grafik 5.6.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir, Kepulauan Riau



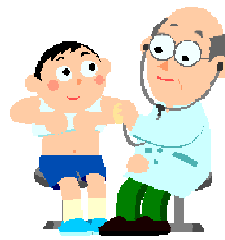
Pada Grafik 5.6.1, terlihat jumlah desa/kelurahan yang mengalami wabah penyakit selama setahun terakhir di mana Demam Berdarah adalah wabah penyakit yang paling sering terjadi di Kepulauan Riau yaitu terjadi di sebanyak 32 desa/kelurahan. Wabah penyakit terbanyak kedua adalah Malaria yang terjadi di 22 desa/kelurahan di Kepulauan Riau.

Grafik 5.6.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jumlah Penderita Gizi Buruk, 2014

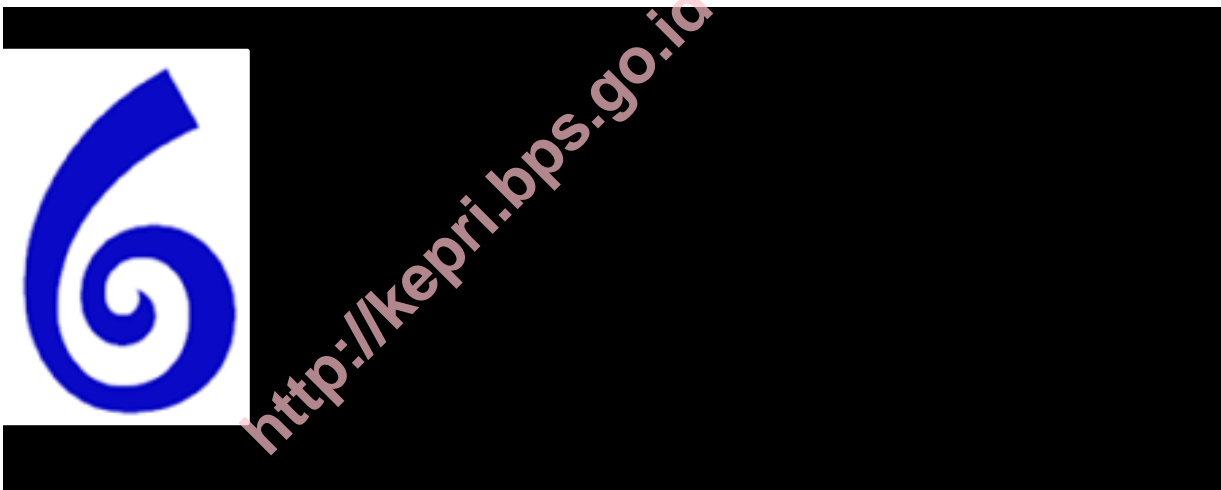


Gizi Buruk adalah bentuk kekurangan zat gizi yang ditandai oleh berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (di bawah rata-rata) menurut ketetapan medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk.

Pada Grafik 5.6.2, terlihat banyaknya desa/kelurahan menurut penderita gizi buruk pada tahun 2014 di Kepulauan Riau. Kasus Gizi Buruk terbanyak terdapat di Kabupaten Lingga yaitu terjadi di 26 desa/kelurahan. Sedangkan untuk Kota Batam tidak terjadi satu pun kasus gizi buruk.



<http://kepri.bps.go.id>



6.1 Keragaman Agama dan Suku/Etnis

Keragaman Agama yang dimaksud di dalam publikasi ini berisi keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di desa/kelurahan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

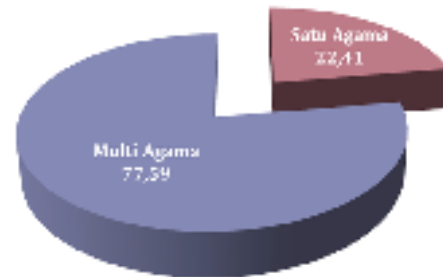
Pada Grafik 6.1.1 tergambar banyaknya desa/kelurahan menurut keragaman agama di Kepulauan Riau pada tahun 2014. Ternyata sebagian besar desa/kelurahan di Kepulauan Riau terdiri dari Multi Agama yaitu sebesar 77,59 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 22,41 persen desa/kelurahan hanya terdiri dari Satu Agama.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota (Tabel 6.1.1), Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang kesemua desa/kelurahan-nya terdiri atas penduduk yang menganut Multi Agama. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki desa/kelurahan terbanyak dengan penduduk/warga yang menganut Multi Agama terdapat di Kabupaten Lingga yaitu sebanyak 67 desa/kelurahan. Sebaliknya, Kabupaten Natuna merupakan daerah dengan desa/kelurahan terbanyak yang memiliki penduduk yang menganut Satu Agama yaitu sebanyak 36 desa/kelurahan.

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu.

Pada Grafik 6.1.2 tergambar banyaknya desa/kelurahan menurut keragaman suku/etnis di Kepulauan Riau pada tahun 2014. Ternyata

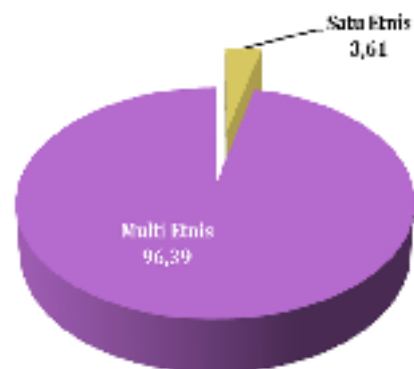
Grafik 6.1.1
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama, Kepulauan Riau 2014



Tabel 6.1.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama, 2014

Kab/Kota	Agama	
	Satu Agama	Multi Agama
Karimun	6	65
Bintan	6	45
Natuna	36	40
Lingga	14	67
Kep. Anambas	31	23
Batam	0	64
Tanjungpinang	0	18
KEP. RIAU	93	322

Grafik 6.1.2
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Suku/Etnis, Kepulauan Riau 2014



sebagian besar desa/kelurahan di Kepulauan Riau terdiri dari Multi Etnis yaitu sebesar 96,39 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 3,61 persen desa/kelurahan hanya terdiri dari Satu Etnis.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota (Tabel 6.1.2), Kabupaten Lingga merupakan daerah yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yang warganya terdiri dari penduduk Multi Etnis yaitu sebanyak 81 desa/kelurahan. Kabupaten Lingga juga merupakan daerah yang kesemua desa/kelurahan-nya terdiri atas penduduk yang Multi Etnis, sama halnya dengan Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

6.2 Penyandang Cacat

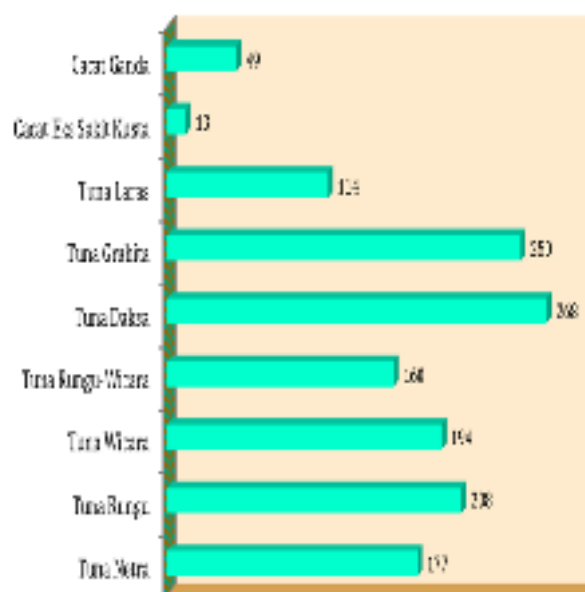
Penyandang cacat adalah orang yang mengalami kecacatan sehingga terganggu/terhambat dalam melakukan suatu kegiatan sebagaimana layaknya.

Pada Grafik 6.2 terlihat banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan penyandang cacat di Kepulauan Riau pada tahun 2014. Dari 415 desa/kelurahan yang ada di Kepulauan Riau, sebanyak 268 desa/kelurahan memiliki penyandang cacat Tuna Daksa, 250 desa/kelurahan memiliki penyandang cacat Tuna Grahita, dan 208 desa/kelurahan memiliki penyandang cacat Tuna Netra. Namun ternyata di Kepulauan Riau juga ada desa/kelurahan yang memiliki penyandang Cacat Eks Sakit Kusta walaupun hanya sebanyak 13 desa/kelurahan.

Tabel 6.1.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Suku/Etnis, Kepulauan Riau 2014

Kab/Kota	Etnis	
	Satu Etnis	Multi Etnis
Karimun	3	68
Bintan	0	51
Natuna	12	64
Lingga	0	81
Kep. Anambas	0	54
Batam	0	64
Tanjungpinang	0	18
KEP. RIAU	15	400

Grafik 6.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat, Kepulauan Riau 2014





<http://kepri.bps.go.id>

7.1 Bioskop dan Pub/Diskotek/Karaoke

Gedung bioskop adalah gedung yang khusus digunakan untuk pertunjukkan film, biasanya dilengkapi tempat penjualan tanda masuk (karcis) dan tempat menggantungkan gambar iklan film yang sedang atau akan diputar.

Pub/Diskotik/Karaoke adalah tempat/gedung yang digunakan secara permanen untuk pub/diskotik/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.

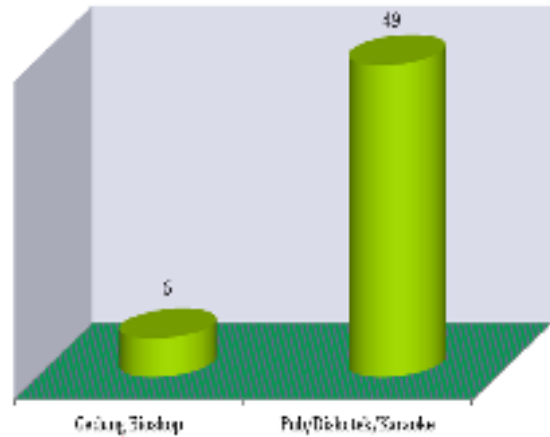
Pada Grafik 7.1, tergambar pada tahun 2014 di Kepulauan Riau hanya ada 6 desa/kelurahan yang memiliki Gedung Bioskop dan 49 desa/kelurahan yang memiliki Pub/Diskotek/Karaoke.

Kemudian pada Tabel 7.1, terlihat banyaknya desa/kelurahan menurut ketersediaan gedung bioskop, dan pub/diskotek/karaoke di Kepulauan Riau pada tahun 2014. Desa/kelurahan yang memiliki Gedung Bioskop hanya terdapat di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, masing-masing hanya 5 desa/kelurahan dan 1 desa/kelurahan. Sedangkan Kota Batam merupakan daerah dengan desa/kelurahan terbanyak yang memiliki Pub/Diskotek/Karaoke yaitu sebanyak 18 desa/kelurahan.

7.2 Program Televisi

Program Televisi adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud disini adalah program TV baik menggunakan antena

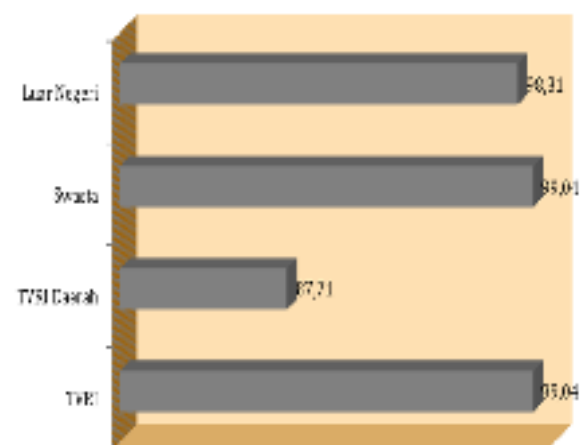
Grafik 7.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Gedung Bioskop, dan Pub/Diskotek/Karaoke, Kepulauan Riau 2014



Tabel 7.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Gedung Bioskop, dan Pub/Diskotek/Karaoke, 2014

Kab/Kota	Gedung Bioskop	Pub/Diskotek/Karaoke
Karimun	0	3
Bintan	0	11
Natuna	0	3
Lingga	0	2
Kep. Anambas	0	5
Batam	5	18
Tanjungpinang	1	7
KEP. RIAU	6	49

Grafik 7.2
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Program Televisi, Kepulauan Riau 2014



parabola/TV kabel ataupun tidak.

Pada Grafik 7.2, tergambar sebagian besar desa/kelurahan yang ada di Kepulauan Riau pada tahun 2014 sudah dapat menerima siaran atau Program Televisi. Sebanyak 99,04 persen desa/kelurahan sudah dapat menikmati siaran TVRI, 87,71 persen desa/kelurahan sudah dapat menikmati siaran TVRI Daerah, 99,04 persen desa/kelurahan dapat menikmati siaran televisi Swasta, dan 98,31 persen desa/kelurahan telah dapat menikmati siaran Luar Negeri.

Tabel 7.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Program Televisi, 2014

Kab/Kota	Program TV			
	TVRI	TVRI Daerah	Swasta	Luar Negeri
Karimun	67	63	70	71
Bintan	51	51	51	51
Natuna	76	66	76	76
Lingga	81	74	81	75
Kep. Anambas	54	35	51	53
Batam	64	64	64	64
Tanjungpinang	18	11	18	18
KEP. RIAU	411	364	411	408

<http://kepri.bps.go.id>



<http://kepri.bps.go.id>

8.1 Prasarana Transportasi

Prasarana Transportasi adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.

Jenis Lalu Lintas adalah jenis sarana dan prasarana lalu lintas yang paling utama digunakan oleh penduduk desa untuk pulang pergi ke desa lain.

Pada Grafik 8.1 tergambar kondisi prasarana transportasi antar desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014. Sebanyak 44,82 persen desa/kelurahan memiliki akses lalu lintas antar desa melalui Darat, 17,83 persen desa/kelurahan memiliki akses lalu lintas antar desa melalui Air, dan sebanyak 37,35 persen desa/kelurahan memiliki akses lalu lintas antardesa melalui Darat dan Air.

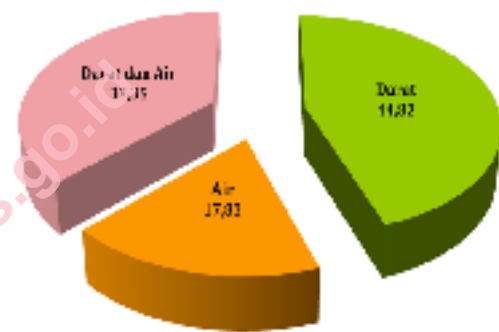
Kemudian pada Tabel 8.1, kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang memiliki akses lalu lintas antar desa/kelurahan melalui Air terdapat pada 7 kabupaten/kota-nya. Kabupaten Lingga merupakan daerah yang memiliki jenis lalu lintas Air paling banyak yaitu sejumlah 28 desa/kelurahan.

8.2 Jenis Permukaan Jalan Terluas

Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan



Grafik 8.1
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi, Kepulauan Riau 2014



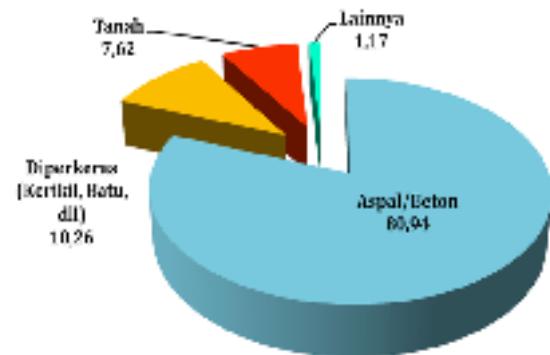
Tabel 8.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi 2014

Kab/Kota	Jenis Lalu Lintas		
	Darat	Air	Darat dan Air
Karimun	41	5	25
Bintan	28	9	14
Natuna	31	3	42
Lingga	27	28	26
Kep. Anambas	5	14	35
Batam	41	14	9
Tanjungpinang	13	1	4
KEP. RIAU	186	74	155

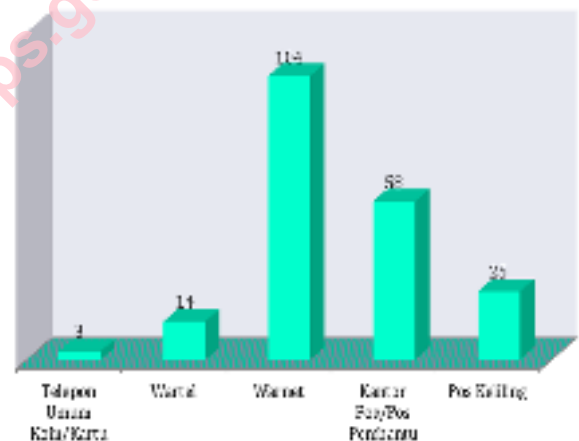
lainnya (kayu/papan yang biasa digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya).

Pada Grafik 8.2 tergambar bahwa pada tahun 2014, sebagian besar desa/kelurahan di Kepulauan Riau memiliki permukaan jalan berupa Aspal/Beton sebagai jenis permukaan jalan terluas yaitu sebanyak 80,94 persen desa/kelurahan. Sebanyak 10,26 persen desa/kelurahan memiliki permukaan jalan Diperkeras (Kerikil, Batu, dll), sebanyak 7,62 persen desa/kelurahan memiliki permukaan jalan Tanah, dan sebanyak 1,17 persen desa/kelurahan memiliki permukaan jalan Lainnya.

Grafik 8.2
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas, Kepulauan Riau 2014



Grafik 8.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, Kepulauan Riau 2014



Tabel 8.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Komunikasi, 2014

Kab/Kota	Telepon Umum Koin/Kartu	Wartel	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu	Pos Keliling
Karimun	0	0	26	8	2
Bintan	0	0	12	6	7
Natuna	3	0	2	4	1
Lingga	0	1	2	3	0
Kep. Anambas	0	0	2	4	2
Batam	0	8	45	27	8
Tanjungpinang	0	5	15	6	5
KEP. RIAU	3	14	104	58	25

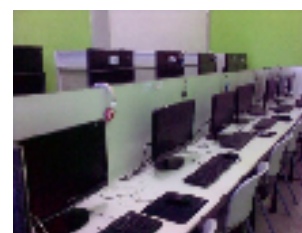
8.3 Sarana Komunikasi

Sarana Komunikasi merupakan alat/cara yang digunakan warga desa untuk berkomunikasi. Telepon Umum Koin/Kartu adalah telepon yang penggunaannya dengan koin/uang logam/kartu/chip dan dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan maupun anggota masyarakat lainnya. Warung Telekomunikasi (Wartel) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi. Warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa internet.

Kantor pos adalah pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil

atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Pada Grafik 8.3 dan Tabel 8.3, sarana komunikasi terbanyak yang dimiliki oleh desa/kelurahan di Kepulauan Riau pada tahun 2014 adalah Warnet, yaitu terdapat di 104 desa/kelurahan. Sementara untuk sarana komunikasi berupa Telepon Umum Koin/Kartu yang masih aktif dan berfungsi, terdapat 3 desa/kelurahan yang memiliki Telepon Umum Koin/Kartu di Kabupaten Natuna.



<http://kepri.bps.go.id>



<http://kepri.bps.go.id>

9.1 Sarana Perdagangan

Minimarket adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m². Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya bisa dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Toko/warung kelontong adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dikelola oleh satu penjual. Warung/kedai makanan minuman adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat ijin usaha.

Pada Grafik 9.1, persentase desa/kelurahan di Kepulauan Riau tahun 2014 yang memiliki Toko/Warung Kelontong adalah sebanyak 96,87 persen. Hal ini berarti hampir setiap desa/kelurahan yang ada di Kepulauan Riau sudah memiliki sarana perdagangan, minimal berupa Toko/Warung Kelontong.



Grafik 9.1
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Perdagangan, Kepulauan Riau 2014



Tabel 9.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Perdagangan, 2014

Kab/Kota	Sarana Perdagangan			
	Mini Market	Restoran/Rumah Makan	Warung/Kedai Makanan Minuman	Toko/Warung Kelontong
Karimun	19	20	48	65
Bintan	14	17	41	51
Natuna	7	4	51	73
Lingga	7	7	44	81
Kep. Anambas	2	5	41	51
Batam	47	41	58	63
Tanjungpinang	15	16	18	18
KEP. RIAU	111	110	301	402

9.2 Sarana Akomodasi

Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan ijin usaha sebagai hotel. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.

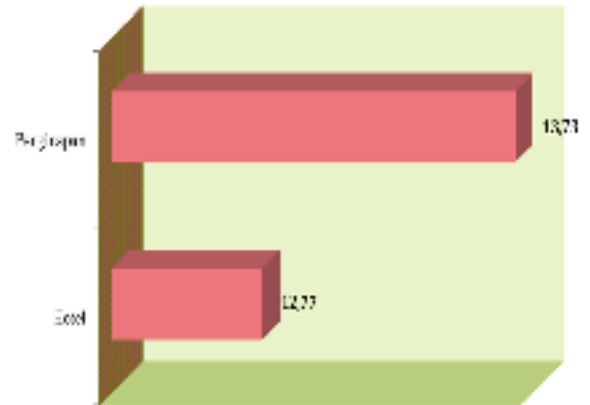
Pada Grafik 9.2, persentase desa/kelurahan di Kepulauan Riau tahun 2014 yang memiliki sarana akomodasi Hotel adalah 12,77 persen, dan persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana akomodasi Penginapan adalah 13,73 persen.

Kemudian jika melihat Tabel 9.2, kabupaten/kota yang desa/kelurahan-nya paling banyak memiliki sarana akomodasi Hotel terdapat di Kota Batam, sedangkan untuk akomodasi Penginapan paling banyak terdapat di desa/kelurahan di Kabupaten Natuna.

9.3 Sarana Pemasaran Produksi

Kelompok Pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok. Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap, yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen. Pasar dengan bangunan semi permanen adalah

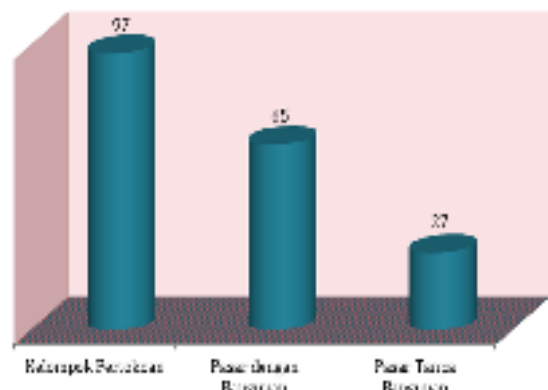
Grafik 9.2
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Akomodasi, Kepulauan Riau 2014



Tabel 9.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Akomodasi, 2014

Kab/Kota	Sarana Akomodasi	
	Hotel	Penginapan
Karimun	5	10
Bintan	8	8
Natuna	2	11
Lingga	3	8
Kep. Anambas	4	8
Batam	21	6
Tanjungpinang	10	6
KEP. RIAU	53	57

Grafik 9.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Pemasaran Produksi, Kepulauan Riau 2014



pasar pada bangunan tetap, yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding. Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan termasuk pasar terapung, pasar subuh.

Pada Grafik 9.3 terlihat bahwa di Kepulauan Riau pada tahun 2014, sarana pemasaran produksi terbanyak yaitu berupa Kelompok Pertokoan, yang dimiliki oleh 97 desa/kelurahan. Sedangkan untuk Pasar dengan Bangunan berada di 65 desa/kelurahan.

Desa/kelurahan terbanyak yang memiliki Kelompok Pertokoan terdapat di Kota Batam yaitu sebanyak 45 desa/kelurahan dan desa/kelurahan terbanyak yang memiliki Pasar dengan Bangunan juga terdapat di Kota Batam yaitu sebanyak 30 desa/kelurahan (Lihat Tabel 9.3).

9.4 Sarana Produksi Pertanian

Kios Penjual Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang dibedakan menurut status kepemilikan yaitu: KUD atan Non-KUD.

Pada Tabel 9.4, banyaknya desa/kelurahan di Kepulauan Riau tahun 2014 yang memiliki kios sarana produksi pertanian milik KUD terbanyak terdapat di Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 3 desa/kelurahan. Sedangkan desa/kelurahan terbanyak yang memiliki kios saprotan milik Non-KUD terbanyak terdapat di Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 14 desa/kelurahan.

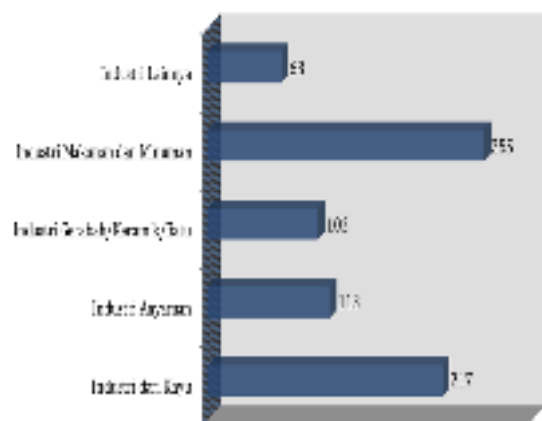
Tabel 9.3
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Pemasaran Produksi, 2014

Kab/Kota	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan	Pasar Tanpa Bangunan
Karimun	17	7	2
Bintan	10	8	2
Natuna	4	6	0
Lingga	7	6	0
Kep. Anambas	2	4	0
Batam	45	30	22
Tanjungpinang	12	4	1
KEP. RIAU	97	65	27

Tabel 9.4
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian, 2014

Kab/Kota	Kios Sarana Produksi Pertanian	
	KUD	Non KUD
Karimun	3	3
Bintan	1	14
Natuna	0	1
Lingga	0	6
Kep. Anambas	0	1
Batam	2	8
Tanjungpinang	1	4
KEP. RIAU	7	37

Grafik 9.5
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Industri Kecil dan Mikro, Kepulauan Riau 2014



9.5 Industri Kecil dan Mikro

Industri kecil adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha. Industri mikro adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.

Pada Grafik 9.5 terlihat banyaknya desa/kelurahan yang memiliki industri kecil dan mikro di Kepulauan Riau pada tahun 2014, sebanyak 217 desa/kelurahan memiliki Industri dari Kayu, 113 desa/kelurahan memiliki Industri Anyaman, 102 desa/kelurahan memiliki Industri Gerabah/Keramik/Batu, 255 desa/kelurahan memiliki Industri Makanan dan Minuman, dan 68 desa/kelurahan yang memiliki Industri Lainnya.

Tabel 9.5
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Industri Kecil dan Mikro, 2014

Kab/Kota	Industri dari Kulit	Industri dari Kayu	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam	Industri Anyaman	Industri Gerabah/Keramik/Batu	Industri dari Kain/Tenun	Makanan dan Minuman	Industri Lainnya
Karimun	1	27	7	12	24	1	21	6
Bintan	2	29	1	21	26	4	50	3
Natuna	0	39	1	30	23	17	50	14
Lingga	0	53	0	32	11	0	42	20
Kep. Anambas	0	27	2	13	5	3	29	2
Batam	0	37	8	5	11	9	47	16
Tanjungpinang	0	5	0	0	2	3	16	7
KEP. RIAU	3	217	19	113	102	37	255	68



<http://kepri.bps.go.id>

10.1 Perkelahian Massal

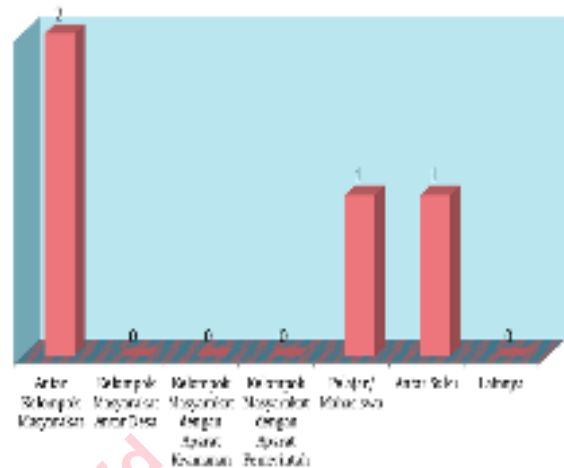
Perkelahian Massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku antara lain: antar kelompok masyarakat, kelompok masyarakat antar desa, kelompok masyarakat dengan aparat keamanan, kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah, pelajar/mahasiswa, antar suku, dan lainnya.

Pada Grafik 10.1.1, tergambar banyaknya desa/kelurahan di Kepulauan Riau yang mengalami perkelahian massal yang terjadi selama setahun terakhir. Jenis perkelahian massal yang paling banyak terjadi adalah Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat, yang terjadi di 2 desa/kelurahan. Selain itu Perkelahian Pelajar/Mahasiswa dan Perkelahian Antar Suku di Kepulauan Riau masing-masing terjadi di 1 desa/kelurahan.

Melihat Tabel 10.1.1, desa/kelurahan di Kepulauan Riau yang mengalami Perkelahian Massal selama setahun terakhir hanya terdapat di 2 kabupaten/kota. Kabupaten Karimun terdapat 2 desa/kelurahan yang mengalami Perkelahian Antar Kelompok Masyarakat dan 1 desa/kelurahan yang mengalami Perkelahian Antar Suku. Kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 desa/kelurahan yang mengalami Perkelahian Pelajar/Mahasiswa.

Kemudian pada Grafik 10.1.2, terlihat bahwa hanya sebanyak 3 desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal di Kepulauan Riau selama setahun terakhir. Perkelahian massal yang terjadi pun juga menyebabkan adanya korban luka-luka, tetapi tidak ada korban meninggal.

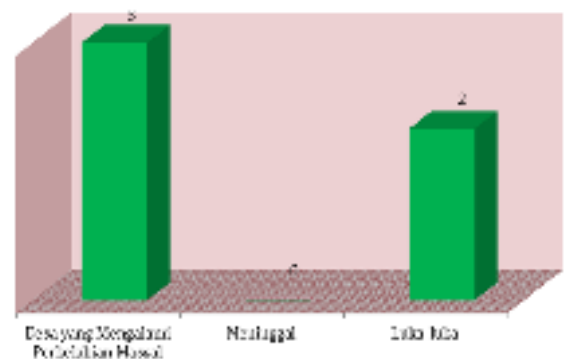
Grafik 10.1.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir, Kepulauan Riau



Tabel 10.1.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir

Kab/Kota	Antar Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat Antar Desa	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	Pelajar/Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
Karimun	2	0	0	0	0	1	0
Bintan	0	0	0	0	0	0	0
Natuna	0	0	0	0	0	0	0
Lingga	0	0	0	0	0	0	0
Kep. Anambas	0	0	0	0	1	0	0
Batam	0	0	0	0	0	0	0
Tanjungpinang	0	0	0	0	0	0	0
KEP. RIAU	2	0	0	0	1	1	0

Grafik 10.1.2
Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban Selama Setahun Terakhir, Kepulauan Riau



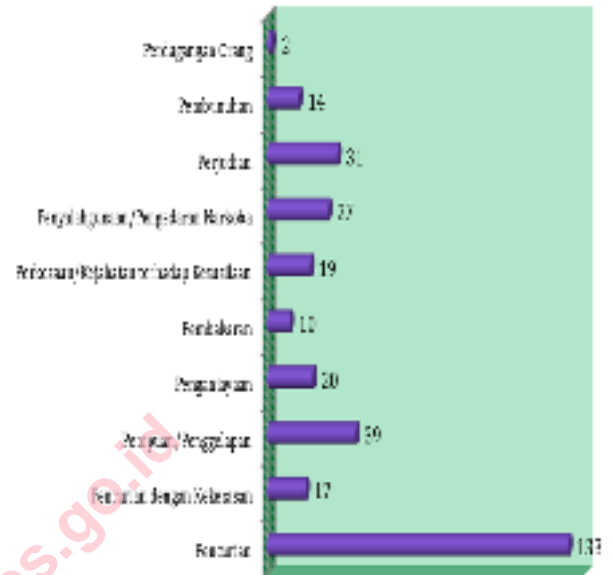
Korban luka-luka akibat perkelahian massal tercatat sebanyak 2 orang.

10.2 Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kesalahan yang dilakukan seseorang yang bersifat melanggar hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pada Grafik 10.2, tergambar banyaknya desa/kelurahan di Kepulauan Riau yang mengalami kejadian tindak pidana selama setahun terakhir. Tindak pidana Pencurian merupakan tindak kejahatan yang paling sering terjadi di Kepulauan Riau selama setahun terakhir, yang terjadi di 133 desa/kelurahan. Tindak pidana lain yang cukup sering terjadi Kepulauan Riau selama setahun terakhir adalah tindak kejahatan Penipuan/Penggelapan dan Perjudian yang masing-masing terjadi di 39 dan 31 desa/kelurahan.

Grafik 10.2
Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Pidana Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Pidana, Kepulauan Riau





<http://kepri.bps.go.id>

11.1 Umur Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Syarat pendidikan kepala desa adalah paling rendah tamat sekolah menengah pertama/ sederajat dan berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.

Umur kepala desa/lurah dibagi berdasarkan beberapa kelompok umur yaitu : 24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 50-54 tahun, dan 55 tahun ke atas.

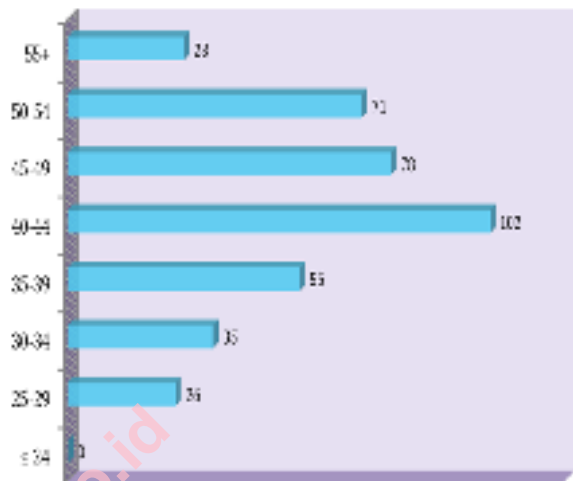
Berdasarkan Tabel 11.1, rata-rata seorang kepala desa/lurah di Kepulauan Riau menjabat pada kelompok umur 40-44 tahun. Hal itu terlihat dari banyaknya desa/kelurahan yang kepala desa/lurah-nya berada pada rentang umur 40-44 tahun, yaitu sebanyak 102 desa/kelurahan pada tahun 2014. Namun tidak ada satu pun desa/kelurahan yang umur kepala desa/lurah-nya berada pada rentang di bawah 24 tahun.

11.2 Pendidikan Kepala Desa/Lurah

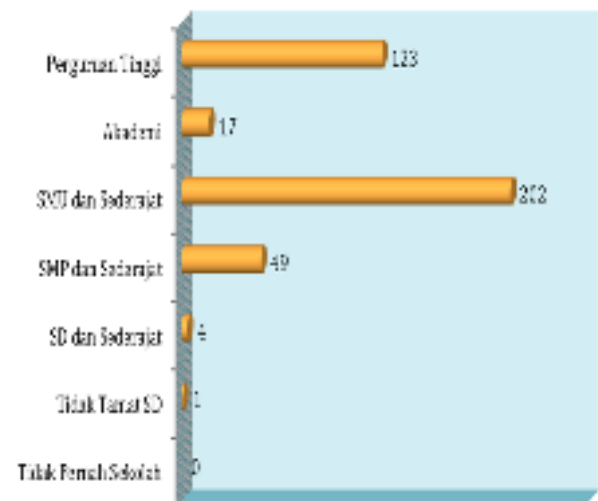
Pendidikan kepala desa/lurah dibagi beberapa kelompok yaitu :

- Tidak pernah sekolah
- Tidak tamat SD
- SD dan sederajat
- SMP dan sederajat
- SMA dan sederajat
- Akademi
- Perguruan tinggi

Grifik 11.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah, Kepulauan Riau 2014



Grifik 11.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Desa/Lurah, Kepulauan Riau 2014



Untuk menjadi seorang kepala desa/lurah, pendidikan menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting.

Pada Grafik 11.2, tergambar banyaknya desa/kelurahan di Kepulauan Riau pada tahun 2014 menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala desa/lurah. Sebagian besar desa/kelurahan di Kepulauan Riau memiliki kepala desa/lurah yang berpendidikan SMU/Sederajat yaitu sebanyak 202 desa/kelurahan. Sebanyak 123 desa/kelurahan, kepala desa/lurah-nya menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Namun terdapat 1 desa/kelurahan yang kepala desa/lurah-nya Tidak Tamat SD.



<http://kepri.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan kedalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, berpendudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olahraga, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, otonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat, serta keterangan pemerintah desa.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Kijang Lama No. A8 Tanjungpinang 29123

Telp.: (0771)4571131, fax.: (0771)4571132

email: bps2100@bps.go.id website: kepri.bps.go.id

ISBN 978-602-09-7922-9



9 786020 979229